

## Ekonomi Biru Indonesia untuk Perikanan Berkelanjutan

### Indonesian Blue Economy for Sustainable Fisheries

Yashinta Kumala Dewi<sup>1✉</sup>, Baso Aswar<sup>2</sup>, Jamaluddin Fitra Alam<sup>2</sup>, dan Safruddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin,  
Jln. Poros Malino Km. 6 Bontomarannu, Kabupaten Gowa 92191

<sup>2</sup>Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin,  
Jln. Perintis Kemerdekaan Km 10, Kota Makassar, 90245

✉corresponding author: yashinta@unhas.ac.id

#### Abstrak

Ekonomi Biru adalah sistem pengelolaan seluruh sumber daya ekosistem akuatik termasuk ekosistem perairan laut dan ekosistem darat yang terkait dengan nilai ekonomi, keberlanjutan ekosistem dan sumber daya produksi, serta distribusi manfaatnya. Adopsi konsep ini di Indonesia menggunakan istilah ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan untuk menekankan aspek pemerataan manfaat dari pengembangan ekonomi biru dengan memastikan keberlanjutan daya dukungnya. Dalam tulisan ini dipaparkan tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia berbasis konsep ekonomi biru untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan yang ada. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur yang dikeluarkan oleh instansi dan stakeholder strategis sebagai rujukan utama dalam kajian ini. Dalam kajian ini ditemukan tantangan besar yang dihadapi adalah masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal seperti illegal fishing, kerusakan hutan mangrove, ekosistem lamun, terumbu karang, dan kegiatan produksi dan industri perikanan yang seringkali kurang memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dipandang perlu penerapan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan harus berfokus pada beberapa hal yang mendesak untuk pencapaian tujuan ekonomi biru Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebagai role model untuk tujuan riset telah dibuat rekomendasi dan upaya riset dengan peta jalan untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis secara berkelanjutan berbasis program ekonomi biru Indonesia di wilayah Teluk Bone. Pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis konsep ekonomi biru dapat dikembangkan dan diaplikasikan dengan baik melalui kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder yang ada yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, NGO dan masyarakat nelayan.

Kata kunci: ekonomi biru, sumberdaya perikanan, keberlanjutan.

#### Abstract

Blue economy is a management system for all aquatic ecosystem resources, including marine and terrestrial ecosystems, related to economic value, sustainability of ecosystems and production resources, and distribution of benefits. The adoption of this concept in Indonesia uses the term inclusive and sustainable blue economy to emphasize the equitable distribution of benefits from the development of the blue economy by ensuring the sustainability of its carrying capacity. This paper explains the importance of managing Indonesian fisheries resources based on the blue economy concept to ensure the sustainability of existing fisheries resources. The literature study method issued by agencies and strategic stakeholders is the primary reference in this study. In this study, it was found that the significant challenges faced were the problem of environmental damage due to illegal activities such as illegal fishing, damage to mangrove forests, seagrass ecosystems, coral reefs, and production activities and the fisheries industry that often pays little attention to sustainability aspects so that it is deemed necessary to implement sustainable fisheries management policies that must focus on several urgent matters to achieve Indonesia's blue economy goals. Based on this, as a role model for research purposes, recommendations and research efforts have been made with a roadmap for the sustainable use of pelagic fisheries resources based on Indonesia's blue economy program in the Bone Bay area. Sustainable fisheries management based on the blue economy concept can be developed and applied well through collaboration and synergy with all existing stakeholders consisting of the government, universities, NGOs, and fishing communities

Keywords: blue economy, fisheries resources, sustainability

## Pendahuluan

Ekonomi biru adalah paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ini telah menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global, terutama karena laut dan ekosistem pesisir memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas lingkungan serta menyediakan sumber daya yang esensial bagi kehidupan manusia. Secara khusus, ekonomi biru mencakup sektor-sektor strategis seperti pariwisata bahari, energi terbarukan, dan konservasi ekosistem laut dan perikanan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024), kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional mencapai sekitar 2,59% dengan nilai tambah bruto mencapai Rp 554,7 triliun, menunjukkan peran penting sektor ini dalam mendukung ekonomi nasional (KKP, 2024).

Di tingkat global, ekonomi biru menjadi bagian integral dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDG 14 atau kehidupan bawah laut yang berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, memberikan landasan untuk berbagai inisiatif yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Laut tidak hanya menyediakan makanan bagi miliaran orang di seluruh dunia, tetapi juga bertindak sebagai penyerap karbon terbesar di planet ini. Dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim, peran laut sebagai stabilizator ekosistem global semakin mendapat perhatian.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan ekonomi biru pada level global. Wilayah lautnya mencakup lebih dari dua pertiga dari total wilayah negara, dengan garis pantai sepanjang 108.000 km dan kekayaan biodiversitas laut yang sangat tinggi. Potensi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.

Menuju tahun emas kemerdekaan Indonesia 2045, Pemerintah melalui BAPPENAS sudah mengeluarkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2025-2045 yang mencakup seluruh sektor terkait. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengeluarkan Peta Jalan Ekonomi Biru 2025-2045 untuk lima sektor prioritas KKP dalam urutan: konservasi sumber daya, perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan budidaya kelautan, penguatan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan peningkatan pengelolaan sampah laut terutama plastik yang dikenal dengan bulan cinta laut (Gambar 1).



Gambar 1. Lima Program Prioritas Berbasis Ekonomi Biru.

Dalam rangka mewujudkan perikanan tangkap berkelanjutan berbasis ekonomi biru, terdapat persoalan umum yang sering ditemui di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia, yaitu antara lain tekanan akibat pemanfaatan yang tinggi (*over exploited*) terhadap sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil dan kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan perairan. Pada sisi lain dalam upaya untuk membangun industri perikanan tangkap yang tangguh, berkelanjutan, pemerintah tidak memiliki informasi yang lengkap tentang daerah potensial penangkapan ikan (*fishing ground*) ikan pelagis di wilayah perairan Indonesia secara spatial dan temporal dalam siklus satu tahun, pada hal data ini dapat digunakan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan pelagis laut lepas yang juga dimaksudkan untuk mengurangi eksploitasi sumberdaya yang berlebihan yang di wilayah pesisir dan pulau kecil.

### Metode Penelitian

Kegiatan kajian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 melalui studi literatur yang dikeluarkan oleh instansi dan stakeholder strategis sebagai rujukan dalam kajian ini.

Sumber rujukan utama berasal dari BAPPENAS (2023), Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan (2024), dan sumber-sumber lain yang mendukung kajian ini seperti riset yang dilakukan oleh para penulis.

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi Eksisting Ekonomi Biru Indonesia

Konsep ekonomi biru mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan lestari dengan tujuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian dan lapangan pekerjaan serta kesehatan ekosistem laut. Pemerintah Indonesia telah membangun pondasi dan peta jalan untuk mewujudkan visi 2045 sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Saat ini sudah disusun beberapa dokumen yang mengarahkan perencanaan pembangunan Indonesia menuju 2045.

BAPPENAS sudah menerbitkan Peta Jalan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2025-2045 sebagai tindak lanjut dari penerjemahan Visi Indonesia Emas 2045, *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045, dan Peta Jalan Ekonomi Biru Nasional yang mencakup arahan dan strategi besar untuk memandu pengembangan ekonomi kemaritiman yang terdiversifikasi dan berkelanjutan, serta berbasis pada kesehatan dan ketahanan ekosistem kelautan dan manfaat bagi generasi sekarang dan di masa yang akan datang.

Arahan dan strategi tersebut diharapkan memberi payung kebijakan lintas sektor untuk menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu penggerak produktivitas dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia juga akan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan RPJMN berikutnya sampai tahun 2045.

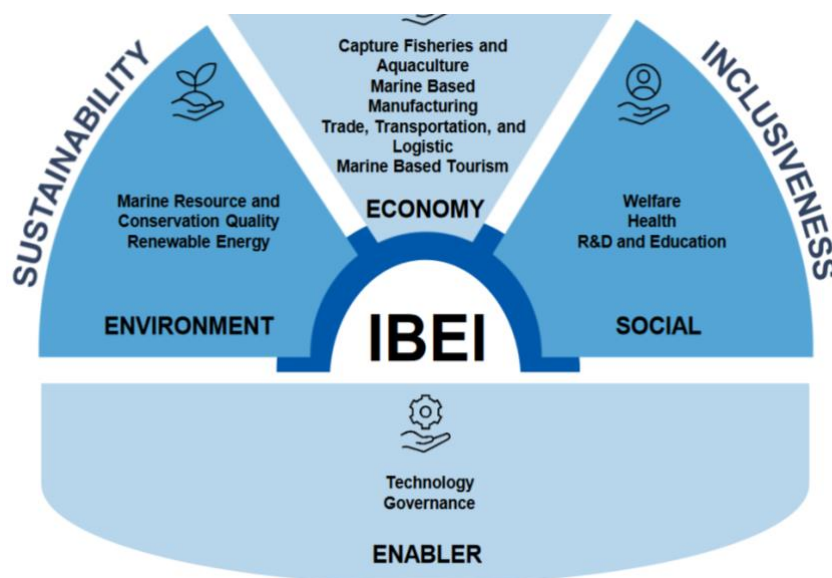
Ekonomi biru merupakan komponen penting dalam transformasi perekonomian Indonesia menuju Visi 2045, termasuk keluar dari jebakan pendapatan menengah sebelum tahun 2045. Ini akan membantu memastikan Indonesia memenuhi komitmen nasional dan internasional, serta mengoptimalkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejalan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2014 tentang Laut, Pasal 14 paragraf 1 yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan kelautan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya laut dengan menerapkan prinsip ekonomi biru.

Kerangka pembangunan ekonomi biru dijabarkan dalam amanat RPJPN 2025–2045, khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Kondisi geografis dan fenomena alam di wilayah kepulauan Indonesia mengakibatkan pembangunan tersebut seringkali terkendala dalam pemerataan. Ekonomi biru merupakan aktivitas perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumberdaya lokal oleh masyarakat setempat (inklusif) yang menuntut kreativitas, inovasi, efisiensi, dan efektivitas, tanpa menghasilkan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

### Upaya Meningkatkan Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep pengembangan ekonomi dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Berdasarkan data BAPPENAS tahun 2023, dapat kita lihat indeks ekonomi biru untuk masing-masing provinsi di Indonesia (Gambar 3). Nilai IBEI (*Indonesia Blue Economy Index*) yang memberikan indikasi pentingnya peran kegiatan ekonomi berbasis ekosistem akuatik yang terdiri dari tiga pilar pembentuk indeks ini, yaitu pilar sosial, pilar lingkungan dan pilar ekonomi. Indeks ini menunjukkan implementasi ekonomi biru saat ini dan peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekosistem ekuatik berbasis tiga pillar penggerak. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan setiap provinsi harus menjadikan sektor-sektor ekonomi biru sebagai pendorong pertumbuhan dengan memastikan daya dukung sumber daya dan jasa ekosistemnya agar tetap berkelanjutan.



Gambar 2. Pilar- Pilar dalam Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Bappenas, 2023)

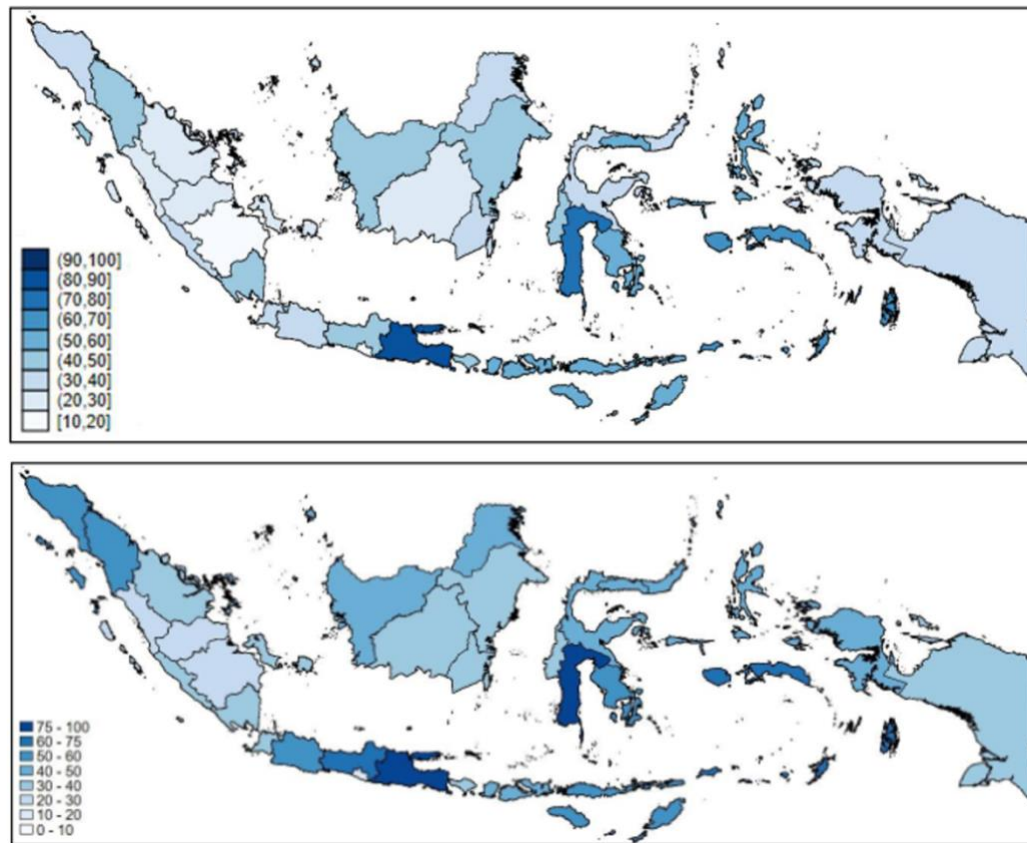
Tantangan besar yang dihadapi adalah masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal seperti illegal fishing, kerusakan hutan mangrove, ekosistem lamun, terumbu karang, dan kegiatan produksi dan industri perikanan yang seringkali kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Pengembangan ekonomi biru di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis kelautan.
- Ketergantungan pada sektor perikanan tradisional yang belum sepenuhnya mengadopsi praktik berkelanjutan.
- Ancaman terhadap ekosistem laut akibat perubahan iklim, polusi laut, dan praktik perikanan yang merusak.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan ekonomi biru dan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi biru Indonesia harus berfokus pada beberapa hal:

- *Pengembangan Ekonomi Biru*: Memanfaatkan potensi laut dengan cara yang berkelanjutan, seperti pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis ekosistem, dan penguatan industri akuakultur.
- *Peningkatan Infrastruktur*: Membangun konektivitas yang lebih baik antar pulau dan antar daerah dengan transportasi laut dan udara.
- *Pemberdayaan Masyarakat*: Pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal dan sumber daya alam.
- *Konservasi Lingkungan*: Menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi laut.

Berdasarkan arahan yang telah diuraikan di atas, perlu mengidentifikasi potensi ekonomi biru di setiap wilayah perairan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui indeks kinerja ekonomi biru berdasarkan pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar sosial.



Gambar 3. Indeks Ekonomi Biru Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 (atas) dan Tahun 2023 (bawah).

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati perairan yang sangat tinggi dalam konteks lingkungan dan biodiversitas diantaranya dikenal sebagai salah satu kawasan dengan terumbu karang terkaya di dunia dan sebagai hotspot keanekaragaman hayati laut dengan potensi sumberdaya ikan yang sangat melimpah baik ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak terumbu karang, illegal fishing dan kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan lainnya yang seringkali kurang memperhatikan aspek keberlanjutan (Zainuddin *et.al.*, 2017; Mallawa dkk.,2018; Safruddin *et.al.*, 2019; Dewi dkk., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, telah dibuat rekomendasi dan upaya riset sebagai *role model* untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis secara berkelanjutan berbasis program ekonomi biru Indonesia di wilayah Teluk Bone (Gambar 4), salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI- 713), dengan peta jalan penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Tahun 2023-2024

| No. | Provinsi              | IBEI 2022 | IBEI 2023 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1   | Sulawesi Selatan      | 78.59     | 80.86     |
| 2   | Jawa Timur            | 73.52     | 71.63     |
| 3   | Nusa Tenggara Timur   | 69.81     | 68.5      |
| 4   | Sulawesi Utara        | 42.73     | 67.98     |
| 5   | Maluku                | 72.59     | 67.22     |
| 6   | Jawa Tengah           | 58.84     | 65.3      |
| 7   | Nusa Tenggara Barat   | 46.63     | 61.83     |
| 8   | Sulawesi Tenggara     | 60.19     | 60.57     |
| 9   | Sulawesi Tengah       | 50.16     | 59.87     |
| 10  | Sumatera Utara        | 50.12     | 58.77     |
| 11  | Papua Barat           | 50.47     | 57.85     |
| 12  | Aceh                  | 46.5      | 55.01     |
| 13  | Jawa Barat            | 49.44     | 54.65     |
| 14  | Maluku Utara          | 50.4      | 54.57     |
| 15  | Gorontalo             | 44.85     | 47.55     |
| 16  | Pulau Riau            | 42.52     | 45.49     |
| 17  | Kalimantan Barat      | 41.94     | 39.54     |
| 18  | Kalimantan Timur      | 33.46     | 37.33     |
| 19  | Riau                  | 27.09     | 32.87     |
| 20  | Bengkulu              | 34.79     | 31.47     |
| 21  | Pulau Bangka Belitung | 29.17     | 31.27     |
| 22  | Sulawesi Barat        | 33.77     | 31.23     |
| 23  | Kalimantan Utara      | 34.19     | 30.66     |
| 24  | Bali                  | 33.84     | 30.28     |
| 25  | Sumatera Barat        | 26.29     | 29.73     |
| 26  | Papua                 | 34.27     | 29.68     |
| 27  | Banten                | 30.09     | 29.05     |
| 28  | Kalimantan Selatan    | 26.64     | 28.97     |
| 29  | Kalimantan Tengah     | 24.79     | 27.57     |
| 30  | Lampung               | 33.97     | 27.65     |
| 31  | DKI Jakarta           | 27.59     | 26.9      |
| 32  | South Sumatera        | 21.38     | 21.01     |
| 33  | Jambi                 | 15.35     | 18.01     |
| 34  | DI Yogyakarta         | 10.67     | 11.47     |

Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam menerapkan prinsip ekonomi biru secara berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis sumber daya kelautan. Berdasarkan data tahun 2022–2023, terdapat dinamika signifikan pada level provinsi yang mencerminkan ketimpangan kapasitas dan implementasi pembangunan ekonomi biru antarwilayah.

Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan skor IBEI tertinggi secara nasional, yaitu meningkat dari 78,59 (2022) menjadi 80,86 (2023), menunjukkan penguatan signifikan dalam pengelolaan sektor maritim secara berkelanjutan. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peran sentral provinsi tersebut dalam industri perikanan budidaya, pengolahan hasil laut, serta konektivitas pelabuhan yang baik. Sebaliknya, beberapa provinsi mengalami penurunan nilai IBEI. Jawa Timur, yang sebelumnya menempati posisi kedua tertinggi pada 2022 dengan skor 73,52, mengalami penurunan menjadi 71,63 di tahun 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh tekanan lingkungan di wilayah pesisir akibat industrialisasi pesisir dan konversi lahan mangrove.

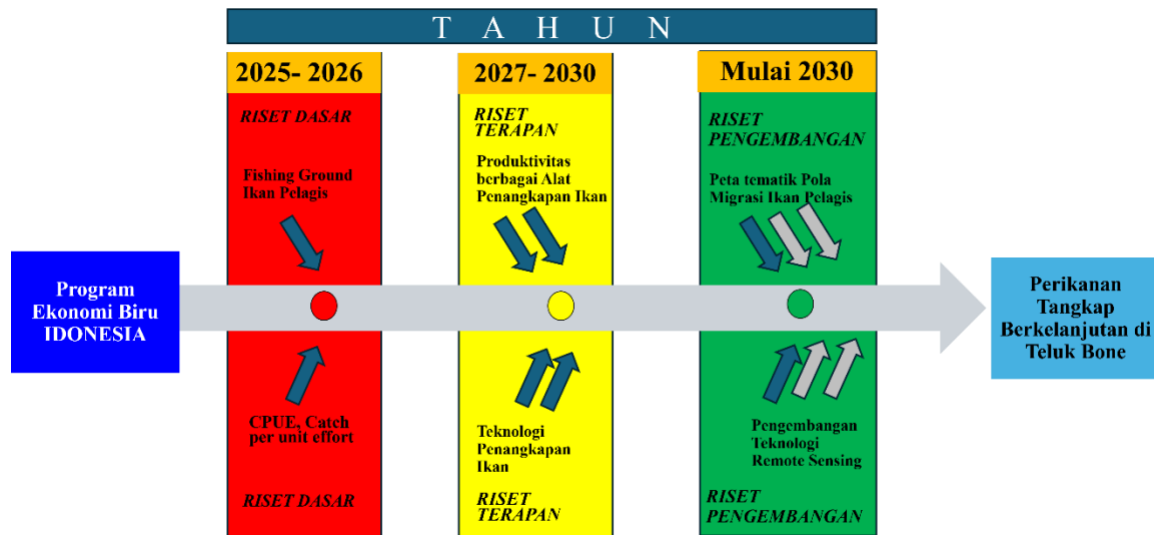
Secara umum, data IBEI menunjukkan adanya kesenjangan spasial dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Wilayah Indonesia Timur—terutama Sulawesi dan sebagian Maluku menunjukkan kecenderungan peningkatan, sedangkan wilayah barat dan tengah seperti Sumatera dan Kalimantan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.

Tabel 2. Perbandingan IBEI 2022 dan 2023

| Pillar/Sub-Pillar                                    | IBEI 2022 | IBEI 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ekonomi: Perikanan Tangkap dan Akuakultur            | 9.84      | 9.59      |
| Ekonomi: Manufaktur berbasis Kelautan                | 20.07     | 21.57     |
| Ekonomi: Perdagangan, Transportasi dan Logistik      | 10.09     | 11.92     |
| Ekonomi: Pariwisata Berbasis Laut                    | 25.22     | 26.32     |
| Ekonomi: Pendukung: Teknologi                        | 6.13      | 6.4       |
| Ekonomi: Pendukung: Tata Kelola                      | 14.8      | 15.45     |
| Lingkungan: Sumber Daya Laut dan Kualitas Konservasi | 26.8      | 20.32     |
| Lingkungan: Energi Laut Terbarukan                   | 13        | 10.99     |
| Sosial: Kesejahteraan                                | 26.05     | 26.2      |
| Sosial: Pendidikan                                   | 21.15     | 22.08     |
| Sosial: Kesehatan                                    | 61.32     | 62.85     |
| Pilar: Ekonomi                                       | 18.47     | 20.15     |
| Pilar: Lingkungan                                    | 30.98     | 28.94     |
| Pilar: Sosial                                        | 52.35     | 53.22     |
| Rata-rata IBEI                                       | 41.28     | 43.98     |

Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI) menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 6,54% dari 41,28 pada tahun 2022 menjadi 43,98 pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disumbang oleh peningkatan kinerja pada pilar ekonomi dan sosial, sementara pilar lingkungan justru menunjukkan penurunan kinerja. Pilar ekonomi mengalami peningkatan dari 18,47 menjadi 20,15, didorong oleh perbaikan dalam sub-pilar seperti manufaktur berbasis kelautan, pariwisata berbasis laut, dan perdagangan, transportasi, and logistik.

Peningkatan dalam subsektor ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam aktivitas industri maritim dan infrastruktur logistik laut yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi biru



Gambar 4. Peta Jalan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis sebagai Ikan Ekonomis Penting melalui Pendekatan Ekonomi Biru Indonesia.

Pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis konsep ekonomi biru dapat dikembangkan dan diaplikasikan dengan baik melalui kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder yang ada yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, NGO dan masyarakat nelayan dan pengolah ikan.

### Simpulan

Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya dan menjadi kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, kawasan ini bisa menjadi model pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Pengembangan ekonomi biru di Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun demikian, untuk mewujudkan potensi tersebut, perlu adanya kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat. Pendekatan yang holistik dan berbasis pada keberlanjutan lingkungan akan memastikan bahwa ekonomi biru dapat menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan ekosistem laut yang sangat berharga. Salah satu upaya yang potensial dilakukan adalah melakukan riset berbasis roadmap atau peta jalan untuk menghasilkan output solusi yang dibutuhkan stakeholder untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan berbasis konsep ekonomi biru Indonesia. Data

dan informasi berdasarkan analisis Indeks Ekonomi Biru untuk masing-masing kabupaten di wilayah Indonesia berbasis tiga pilar yang ada (pilar ekonomi, sosial dan lingkungan) sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan menuju pengelolaan sumberdaya perikanan yang berimbang berdasarkan tiga pilar tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

### **Ucapan terima kasih**

Kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan maksimal atas dukungan dukungan banyak mitra strategis yang telah memberi akses untuk penguatan studi literatur terkait dengan kajian yang penulis laksanakan. Kepada semua yang terlibat dalam kegiatan ini ini diucapkan terima kasih atas sumbangsinya yang sangat berarti.

### **Daftar Pustaka**

- BAPPENAS. 2023. Indonesia Blue Economy Roadmap. Jakarta.
- BAPPELITBANGDA. 2024. Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Tahun 2025 -2045 Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 233 hal.
- Dewi, Y.K., Safruddin, Zainuddin, M. 2024. Sentra Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Wajo , Jurnal Torani, Volume 7 (2) hal. 151-159.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Outlook Kelautan dan Perikanan 2024. Jakarta: Pusat Data, Statistik, dan Informasi.
- Mallawa, A., F. Amir, Safruddin, dan E. Mallawa. 2018. Keberlanjutan Teknologi Penangkapan Ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) di perairan Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Marine Fisheries Journal. No. 9 hal. 93-106.
- Safruddin, B. Aswar, R. Hidayat, Y.K. Dewi, M.T. Umar, S.A. Farhum, A. Mallawa and M. Zainuddin. 2019. The Fishing Ground of Large Pelagic Fish during the Southeast Monsoon in Indonesian Fisheries Management Area-713. IOP Conference Series 370 (1) 012045.
- Zainuddin, M., Safruddin, Muhammad Banda Selamat M.B, 1, Farhum, S.A. and Hidayat, S. 2017. Prediction of Potential Fishing Zones for Skipjack Tuna During the Northwest Monsoon Using Remotely Sensed Satellite Data. Jurnal Ilmu Kelautan. Vol 22 (2): hal. 59-66.